

Sekolah yang Siswanya Terlibat Tawuran Diusulkan Ditutup 3 Tahun

JAKARTA (IM) - Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala mengusulkan agar setiap sekolah yang muridnya terlibat tawuran, dilarang terima siswa baru selama tiga tahun.

Hal tersebut diungkapkan Adrianus saat hadir dalam jumpa pers di Polres Metro Jakarta Utara, Senin (28/8) tentang penyiraman air keras terhadap enam pelajar SMP di Kamal Muara.

"Sekolah yang punya masalah dengan tawuran, itu satu periode selama tiga tahun tidak lagi menerima siswa, dari kelas satu sampai kelas dua dan tiga," kata Adrianus.

Menurut Adrianus, pemutusan regenerasi sekolah perlu dilakukan karena tidak sedikit tawuran di sejumlah wilayah terjadi karena adanya cerita di masa lalu yang terus

diulang dan dinarasikan sehingga menjadi suatu yang emosional.

"Cerita itu bisa dipotong, itu mesti dihapuskan," tegas Adrianus.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Adrianus berpandangan, sekolah yang tadinya bermasalah dengan tawuran akan diisi dengan angkatan baru yang tidak lagi menerima narasi di masa lalu.

"Tidak lagi menerima legenda itu, tidak lagi menerima cerita itu, tidak ada lagi pihak yang menarasikan bahwa, 'sekolah itu musuh kita ya, layak untuk kita kejar dan cari dia,'" imbuh Adrianus.

Meski begitu, Adrianus menyadari bahwa kebijakan tersebut memerlukan pertimbangan yang matang. ● han

Praperadilan Dugaan Penghentian Penyidikan di Perkara BTS 4G Ditolak

JAKARTA (IM) - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) melawan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gugatan ini dilayangkan lantaran Kejagung diduga telah menghentikan penyidikan empat pihak yang dinilai terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5.

Dugaan korupsi proyek triliunan rupiah ini dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020-2022.

Empat pihak ini digugat dalam tiga gugatan dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang didaftarkan LP3HI pada 21 Juli 2023 dengan nomor 79/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL, 80/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL dan 81/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

"Mengadili, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata hakim tunggal Hendra Utama Sudartododo dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Selasa (29/8).

Adapun dalam gugatan nomor perkara 79/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL, LP3HI menduga Kejagung menghentikan penyidikan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Politikus Partai Golkar ini juga pernah diminta keterangan oleh pihak Kejagung terkait indikasi adanya pengamanan proyek BTS 4G Kominfo tersebut.

Kemudian, pada gugatan dengan nomor 80/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL, Kejagung juga dinilai tidak mengusut keterlibatan Direktur PT Sansaine Exindo, Jemy Sutjiawan, Jemmy Sutjiawan yang sudah diperiksa empat kali oleh Kejagung itu diduga menerima Rp 100 miliar. Bahkan, dia juga telah dicegah ke luar negeri.

Lebih lanjut, gugatan dengan nomor 81/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL diajukan LP3HI lantaran Kejagung dianggap menghentikan penyidikan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.

Nistra diketahui merupakan staf ahli anggota Komisi I DPR. Sementara, Sadikin merupakan perantara pemberian uang yang diperuntukkan bagi oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ● mei

ASN Pindah ke IKN Tahun Depan, Pemerintah Bangun 47 Tower Rusun

JAKARTA (IM) - Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Iwan Suprijanto mengatakan, pihaknya memulai pembangunan 47 tower rusun susun (rusun) bagi aparat sipil negara (ASN) dan pegawai pertahanan keamanan (hankam) di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

Pembangunan dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024.

"Kami mendapat challenge dari Bapak Menteri, minimal pada Juli 2024 sudah terbangun 12 tower beserta meubeler-nya, sehingga sudah dapat langsung dihuni," ujar Iwan dilansir siaran pers di laman Sekretariat Kabinet, Selasa (29/8).

Rusun ASN-hankam tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total

lahan seluas 45,91 hektare. Secara keseluruhan, dari 47 tower rusun ASN-hankam, ada 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri dari 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang.

Kemudian, rusun hankam terdiri dari 7 rusun untuk anggota Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit menampung 2.880 personel.

"Masing-masing tower-nya setinggi 12 lantai, terdiri dari lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasos/fasum (fitness, public space, dan sebagainya), sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian," ujar Iwan.

"Setiap unitnya disiapkan tiga kamar tidur. Jadi di dalam satu unit tersebut terdapat masing-masing kamar tidur untuk satu orang," katanya.

Iwan mengungkapkan, pembangunan 47 tower rusun ASN-hankam ini untuk mendukung proses pemindahan ASN secara bertahap ke IKN yang dimulai tahun 2024.

"Pembangunan 47 tower rusun yang telah dimulai dengan menggunakan dana APBN senilai Rp 9,4 triliun. Sisanya akan menyusul dibangun rusun dengan pendanaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU)," tutur Iwan. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



RAPAT PARIPURNA HUT DPR RI

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) menyerahkan laporan kinerja DPR kepada mantan Ketua DPR periode 2004-2009 Agung Laksono (ketiga kanan) dalam rapat paripurna memperingati HUT ke-78 DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8). Rapat paripurna tersebut sekaligus digelar dalam rangka untuk penyampaian laporan kinerja selama tahun sidang 2022-2023.

Mahfud MD: Korban Peristiwa 1965 Tak Punya Salah kepada Negara

Meskipun para eksil tidak sepenuhnya ingin kembali ke Indonesia. Namun, tetap butuh pengakuan bahwa mereka bukan pengkhianat negara.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, para eksil korban peristiwa 1965 tidak punya kesalahan apa pun kepada negara. Para korban itu tidak kembali ke Indonesia bukan karena keinginan

mereka. Mahfud kemudian mengatakan bahwa para eksil yang merupakan eks mahasiswa ikatan dinas (mahid), dapat menikmati fasilitas sebagai warga negara Indonesia. "Bapak bapak eks Mahid tidak punya kesalahan apapun kepada negara. Silahkan

menikmati fasilitas sebagai warga negara atau eks warga negara yang ingin menjadi WNI kembali," kata Mahfud saat bertemu para eksil Ceko yang disiarkan daring melalui KBRI Praha, dikutip Selasa (29/8).

Meskipun para eksil tidak sepenuhnya ingin kembali ke Indonesia. Namun, tetap butuh pengakuan bahwa mereka bukan pengkhianat negara.

"Kita sudah tau bahwa orang yang sepuh (eksil) itu sebenarnya tidak ingin 100 persen untuk pulang ke Indonesia. Yang diperlukan oleh

mereka ini pada umumnya adalah pengakuan bahwa mereka ini benar-benar tidak terlibat dalam kegiatan anti negara. Kita berikan sekarang," katanya.

Kendati demikian, Mahfud menegaskan, pemerintah tetap akan memberikan kemudahan, bagi mereka korban peristiwa 1965 yang ingin kembali menjadi warga negara Indonesia (WNI).

"Pemerintah buat kebijakan bapak-bapak yang ingin jadi WNI kembali dibuka sepenuhnya. Bapak, ibu, ingin berkunjung ke Indonesia tengok keluarga akan diberi perlakuan khusus, bentuknya akan dijelaskan Bapak Menkuham," kata Mahfud.

"Sekali lagi yang kita lakukan ini untuk mengembalikan hak konstitusional dan hak hukum terhadap korban, yang jadi korban karena tidak salah, tidak sempat membantah, ke pengadilan selalu kalah," kata Mahfud.

Mahfud memastikan, kebijakan penyelesaian nonyudisial untuk pelanggaran HAM berat di masa lalu akan tetap berjalan, meski pemerintahan berganti.

"Kebijakan ini pasti, terus-menerus, diberikan sekarang dan tidak akan terputus, dengan sendirinya hak ini diberikan," katanya.

Sebelumnya, salah seorang eksil peristiwa 1965 bernama Karsidi mengemukakan terima kasih, atas kebijakan penyelesaian nonyudisial untuk pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Namun, kata Karsidi, muncul kekhawatiran setelah

mereka mendapatkan kemudahan untuk kembali menjadi warga negara Indonesia (WNI). Ia takut jika pemerintah berganti, kebijakan tersebut tidak akan berlaku lagi.

"Sekarang (penyelesaian non yudisial) berhasil karena Presiden Jokowi di parlemen punya kekuatan dan keberanian untuk melakukan hal ini," katanya saat dialog dengan Mahfud dan Yasonna.

"Bagaimana nanti kalau Pak Jokowi udah ga ada, kekuatan yang lain (menduduki pemerintahan), kebetulan dia punya kekuatan tapi ga punya keberanian, apakah (kebijakan) ini bisa langgeng?" katanya.

Mahfud pun meyakinkan para eksil, kebijakan saat ini bakal diteruskan, siapapun pemimpinnya di masa mendatang.

Sebagai informasi, secara keseluruhan, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, total eks Mahid yang masih ada hingga kini berjumlah 139 orang. Adapun 138 tersebar di 10 negara Eropa dan 1 di negara Asia.

Belanda merupakan negara dengan eks Mahid terbanyak yakni 67 orang, disusul Ceko 14 orang. Di Rusia 1 orang, tetapi terdapat 38 orang keturunan eks Mahid di negeri beruang tersebut.

Sementara itu, satu-satunya negara non-Eropa tempat eks Mahid tinggal adalah Suriah dengan jumlah eks Mahid 1 orang. Salah seorang eks Mahid kini sedang mengalami sakit keras dan berharap dapat dimakamkan di Indonesia jika meninggal nanti. ● han



SIDANG MK UJI MATERIIL TENTANG PEMILU

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) berbincang dengan Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) saat memimpin jalannya sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/8). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan ahli pihak terkait Perleudem dan keterangan pihak terkait lainnya.

Mario Dandy Hadapi Vonis 7 September

JAKARTA (IM) - Majelis (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) hakim Pengadilan Negeri akan membacakan vonis Ma-

rio Dandy Satriyo, terdakwa kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora, pada 7 September 2023.

Hal itu disampaikan Majelis Hakim usai pengajuan duplik yang disampaikan pihak anak mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo.

"Putusan akan dijatuhkan hari Kamis 7 September minggu depan ya," kata Hakim Ketua Alimin Ribut Sudjono di ruang sidang, Selasa (29/8)/.

Sebelumnya, Jaksa Penun-

tut Umum (JPU) menuntut Mario Dandy Satriyo 12 tahun penjara. Hal itu disampaikan JPU dalam pembacaan tuntutan di PN Jakarta Selatan pada Selasa (15/8/2023).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mario Dandy dengan pidana penjara selama 12 tahun penjara," kata Jaksa Hafiz Kuriawan saat membacakan surat tuntutan Mario Dandy di PN Jakarta Selatan.

Jaksa meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penganiayaan David Ozora itu

memutuskan.

Menyatakan terdakwa Mario Dandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana secara bersama-sama sebagaimana melanggar Pasal 355 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

"Tak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda," kata Jaksa lagi.

Sebagai informasi, dalam perkara penganiayaan David Ozora, Mario Dandy dan Shane Lukas didakwa Jaksa melanggar pasal tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.

Mario Dandy telah dijerat dakwaan kesatu: Pasal 355 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atau dakwaan kedua: Pasal 76 c juncto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. ● mei

PENGUMUMAN

Berdasarkan keputusan pemegang saham PT. Prima Auto Sentosa, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan") tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana termuat dari akta tanggal 24 Agustus 2023 No. 14, dibuat dihadapan L. Enywati Tjendra, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan bahwa terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2023 Perseroan diubarkan, & menunjuk Bpk. Danny Iskandar Wijaya selaku Likuidator untuk menyelesaikan segala sesuatu sehubungan dengan pembubaran tersebut. Kepada pihak-pihak yang keberatan, dapat mengirimkan surat keberatan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator dengan alamat Jl. Pluit Raya No.134, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, & kepada Kementerian Hukum & HAM RI, Ditjen AHU, Jl. H.R. Rasuna Said Kav-6-7, Jakarta Selatan.

Jakarta, 30 Agustus 2023
Likuidator
PT. Prima Auto Sentosa

PENGUMUMAN

Direksi PT Putra Kary International ("Perseroan") dengan ini mengumumkan mengenai rencana perubahan susunan pemegang saham Perseroan dimana PT Hilon Indonesia bermaksud untuk mengalihkan sahamnya dalam Perseroan kepada PT Sambros Invesco International, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, akan menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan melalui pengalihan saham dari pemegang saham saat ini ("Rencana Pengambilalihan").

Rencana Pengambilalihan akan dilaksanakan dengan persetujuan dari pemegang saham Perseroan. Kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap Rencana Pengambilalihan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pengumuman ini, keberatan disampaikan secara tertulis dengan menjelaskan alasan berikut: dukungan kepada Perseroan di: The Prominence Office Tower, 16 th floor, Jl. Jalur Sutra Barat Kav. 15, Kel. Panunggan Timur, Kec. Pinang, Kota. Tangerang, Provinsi Banten

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi Pasal 127 Ayat 2 dan Ayat 8 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan perubahan (perubahannya). Kota Tangerang, 30 Agustus 2023

Direksi
PT PUTRA KARY INTERNATIONAL

PENGUMUMAN

Direksi PT Samudera Industri ("Perseroan") dengan ini mengumumkan mengenai rencana perubahan susunan pemegang saham Perseroan dimana PT Hilon Indonesia bermaksud untuk mengalihkan sahamnya dalam Perseroan kepada PT Sambros Invesco International, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, akan menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan melalui pengalihan saham dari pemegang saham saat ini ("Rencana Pengambilalihan").

Rencana Pengambilalihan akan dilaksanakan dengan persetujuan dari pemegang saham Perseroan. Kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap Rencana Pengambilalihan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pengumuman ini, keberatan disampaikan secara tertulis dengan menjelaskan alasan berikut: dukungan kepada Perseroan di: Kp. Cisaheun RT/RW. 02/15, Desa. Cikalong, Kec. Cikalong Wetan, Kab. Bandung Barat, Provinsi. Jawa Barat 40556

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi Pasal 127 Ayat 2 dan Ayat 8 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan perubahan (perubahannya). Kabupaten Bandung Barat, 30 Agustus 2023

Direksi
PT SAMUDERA INDUSTRI

PENGUMUMAN

Direksi PT Urecol Indonesia ("Perseroan") dengan ini mengumumkan mengenai rencana perubahan susunan pemegang saham Perseroan dimana PT Hilon Indonesia bermaksud untuk mengalihkan sahamnya dalam Perseroan kepada PT Sambros Invesco International, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, akan menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan melalui pengalihan saham dari pemegang saham saat ini ("Rencana Pengambilalihan").

Rencana Pengambilalihan akan dilaksanakan dengan persetujuan dari pemegang saham Perseroan. Kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap Rencana Pengambilalihan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pengumuman ini, keberatan disampaikan secara tertulis dengan menjelaskan alasan berikut: dukungan kepada Perseroan di: Jl. Raya Serang KM.21, RT. 017, RW. 007, Kp. Cibadak, Desa. Bojong, Kec.Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten 15710

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi Pasal 127 Ayat 2 dan Ayat 8 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan perubahan (perubahannya). Kabupaten Tangerang, 30 Agustus 2023

Direksi
PT URECOL INDONESIA